



PEMDA DIY PRIHATIN NASIB 200.000 PESERTA PBI
Pemkab/Pemkot Diminta Gunakan Dana Cadangan

YOGYA (KR) - Pemda DIY akan tetap berkomitmen melakukan sharing beban pendanaan khususnya bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan Pemkab/Pemkot di DIY. Namun, Pemkab/Pemkot di DIY yang didorong senantiasa berkontribusi untuk menyelamatkan pelayanan kesehatan akhir tahun ini, terutama bagi 200.000 lebih peserta PBI di DIY yang diprediksi akan drop.

"Pemda DIY tentunya akan ikut berkontribusi berbagi beban dengan Pemkab/Pemkot di DIY, tetapi komitmen itu harus kita sama-sama pegang. Manakala Pemkab/Pemkot betul-betul tidak ada dana, provinsi akan turun. Jangan kemudian semua ditanggung provinsi. Jadi marilah kita berkomitmen bersama-sama menyelamatkan pelayanan kesehatan," tandas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY Pembayun Setyaningastuti di Yogyakarta, Minggu (17/11). Pembayun memberikan contoh ada beberapa kabupa-

terkota yang sudah menyediakan dana cadangan seperti Pemkot Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Sedangkan untuk Kulonprogo dan Gunungkidul diharapkan juga memiliki dana cadangan tersebut. Sebelumnya sudah ada Surat Edaran (SE) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Pemkab/Pemkot menggunakan dana taktisnya untuk menyelamatkan pelayanan akhir mulai Oktober hingga Desember 2019 ini. Sebab peserta PBI di DIY yang didrop cukup banyak mencapai lebih dari 200.000 peserta sampai akhir tahun ini.

"Bisa jadi yang didrop lebih dari itu, jadi kita berharap Pemkab/Pemkot berkontribusi sekarang untuk menyelamatkan pelayanan akhir tahun ini. Apalagi tren kebutuhan pelayanan kesehatan pasti naik di akhir tahun. Jadi kami berharap Pemkab/Pemkot dengan mekanisme yang ada tetap melakukan pelayanan rumah sakit. Pemkot Yogyakarta sudah mengkaver itu, tetapi kabupaten lainnya di DIY bisa menggunakan dana taktis sesuai SE Kemenkeu," tuturnya.

Dalam SE Kemenkeu tersebut, Pembayun menjelaskan Pimpinan Daerah diizinkan menggunakan dana taktisnya untuk menutupi kekurangan klaim biaya tanggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) tahun ini. Rumah Sakit umum dan daerah dalam hal ini karena lebih dari 75 persen pasiennya adalah peserta BPJS. Dengan kenaikan premi BPJS pada 2020, Pemda harus tetap mendanai dan mencajarkan anggaran, khususnya bagi peserta PBI berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), di luar dari PBI diarahkan atau giring untuk mandiri. "Tahun ini masih aman untuk peserta PBI di DIY, tetapi kita bu-

tuh Rp90 miliar untuk menopang peserta PBI tahun depan sebab penyakit semakin bertambah sehingga butuh biaya banyak. Kami benar-benar prihatin nasib peserta PBI, jadi kita harus sama-sama berbagi," tegasnya.

Terkait kenaikan turan BPJS 2020, Pembayun menekankan pihaknya tidak keberatan selama bertahap dan sisi suplainya diperbaiki. "Kami setuju saja premi dinaikkan asal bertahap karena kemampuan anggaran daerah itu tidak serta-merta bisa memenuhi dan aturannya ada di ujung tahun. Dari sisi suplainya diperbaiki seperti Rumah Sakit harus kurangi fraud-nya, sarana dan prasarana dipenuhi, pelayanannya maksimal dan sebagainya," pungkas Pembayun.

Instansi	Tindak Lanjut
1.	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2.	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3.	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4.	
5.	

Yogyakarta,
Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005